

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi dan memasuki persaingan dunia kerja sekarang ini diperlukan SDM yang berkualitas, untuk itu SMK SMTI sebagai sekolah yang memiliki orientasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu mandiri baik sebagai tenaga terampil di Industri maupun untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan perlu terus dikembangkan, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dapat dihasilkan.

Tuntutan terhadap lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam keterserapan lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan membuka sekolahnya di Indonesia.

Oleh karena itu persaingan antar lembaga pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Pemberlakuan undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, maka penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada daerah menjadi tanggung jawab bersama. Diharapkan dengan peran semua pihak siswa dapat memiliki kemampuan teknis produktif maupun manajerial dalam upaya mempercepat roda perekonomian rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah didukung dengan kebijakan Propinsi Lampung sebagai sentra industri. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Propinsi Lampung adalah kurangnya pendidikan pada jenjang pendidikan SMK dan belum terserapnya lulusan.

SMK Bandar Lampung merupakan satu-satunya sekolah negeri di bawah Kementerian Perindustrian yang ada di propinsi Lampung dari 6 di Indonesia memiliki keleluasaan untuk merancang dan mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri sehingga di diharapkan mampu mencetak dan mengisi tenaga terampil dan memiliki kompetensi yang baik pada sektor industri sehingga tersedianya anggaran yang proporsional diharapkan dapat meningkatkan rasio keterserapan lulusannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2004: 167) bahwa manajemen keuangan, masalah dana disekolah merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha pendidikan baik dalam menciptakan tenaga terampil sampai pada keterserapan mereka di dunia kerja.

Pertumbuhan sektor industri yang semakin pesat dan penambahan animo masyarakat tentang sekolah SMK khususnya di bidang industri maka sekolah harus berbenah untuk menyiapkan diri ke arah sekolah yang sesuai dengan

tuntutan perkembangan pendidikan. Atas dasar kenyataan tersebut maka SMK Bandar Lampung menata manajemen keuangan dengan memperbesar alokasi anggaran untuk pengembangan, kurikulum, dan bahan ajar, sarana dan prasarana, peralatan dan bahan praktek, dan dana promosi.

Sesuai dengan misi yang ada bahwa SMK SMTI diharapkan dapat Menjadi sekolah terbaik di Indonesia Bidang Analisis & Industri tahun 2015, dengan misi Mencetak Sumberdaya Manusia yang terbaik dibidang kimia analisis dan industri mampu berwirausaha melalui:

1. Penerapan Kurikulum yang berorientasi pada DU/DI
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
3. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
4. Penerapan sistem Manajemen Mutu
5. Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan guna mempercepat pertumbuhan industri daerah dan nasional

Adapun tujuan dan sasaran pendidikan adalah:

Tujuan :

- a) Terciptanya tenaga terampil dibidang teknologi industri baik bidang kimia analis maupun bidang kimia industri
- b) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi industri
- c) Lulusan terserap pada dunia usaha dan dunia industri
- d) Lulusan mampu berwira usaha

Sasaran:

- a) Peningkatan dan pengembangan program sekolah
- b) Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai agar terselenggaranya kegiatan praktikum dapat optimal

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas maka peran struktur anggaran yang tepat sangat menentukan terhadap SDM mutu lulusan yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan menentukan keterserapan lulusan atau tenaga kerja yang siap kerja.

Pada saat ini berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama masalah krisis sumber daya manusia dan krisis ketenagakerjaan semakin kompleks. Krisis kualitas sumber daya manusia dan krisis ketenagakerjaan juga memiliki dampak yang tidak kalah besarnya dibanding krisis lainnya. Dalam membahas masalah ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah sumber daya manusia (SDM). Setidaknya ada dua masalah utama yang patut dikedepankan dalam membahas persoalan SDM yang terus merosot tingkatannya. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan angka pengangguran yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun demi tahun muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 29%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.

Data tentang *Human Development Program* (UNDP) yang disajikan United National for Development Program (UNDP) menunjukkan kualitas SDM tahun 2000 ini berada di urutan 109. Jika tidak ada upaya perbaikan, situasi ini akan terus memburuk ke titik terendah mengingat sejak tahun 1999, HDI untuk

Indonesia adalah urutan 105, sementara tahun sebelumnya di urutan 99.

Sementara itu, pada tahun 2000 jumlah pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai angka yang sangat mengawatirkan sekitar 38,5 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,1 juta orang bila dibandingkan tahun 2004 (Jusuf Iriyanto, 2001).

Salah satu hal yang menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah orang yang menganggur adalah terbatasnya kemampuan sektor riil dalam menyerap jumlah tenaga kerja. Di samping itu, PHK yang dilakukan banyak perusahaan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah berperan dalam meningkatkan jumlah pengangguran.

Persoalan ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran yang mendalam bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi kualitas SDM. Sekalipun didukung potensi sumber daya alam melimpah, suatu Negara sulit untuk berkembang jika tidak didukung SDM yang berkualitas tinggi. Akibatnya kebijakan pemerintah harus selalu difokuskan pada upaya pengembangan kualitas SDM melalui berbagai cara.

Salah satu strategi yang umum dilakukan dengan membuat rancangan sistem pendidikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan SDM yang mampu menghadapi segala bentuk tuntutan perubahan cara-caranya ditempuh melalui proses politik yang menghasilkan kebijakan pengalokasian sebagian besar anggaran untuk program-program pendidikan dan pengembangan SDM. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya struktur anggaran yang besar untuk unit pendidikan masih untuk gaji dan tunjangan sehingga hal tersebut tidak begitu berdampak

pada kompetensi lulusan yang dihasilkan. Padahal jika struktur anggaran yang ada dapat secara proporsional fokus untuk alokasi peningkatan kualitas lulusan maka hal tersebut akan dapat berdampak langsung pada keterserapan mereka setelah lulus.

Masalah pengangguran juga memiliki relevansi erat dengan masalah pendidikan khususnya SMK. Jumlah penganggur yang berlatar belakang pendidikan SMK masih cukup tinggi, karena kadang siswa yang masuk ke SMK memiliki kemampuan awal lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang masuk SMA sehingga siswa kesulitan ketika mereka mengikuti proses pembelajaran diluar faktor ketidak mampuan dunia usaha menyerap pasar tenaga kerja.

Akibat yang ditimbulkan dari masalah ketenaga kerjaan ini adalah jumlah pengangguran yang meningkat sehingga masalah ini merembet ke masalah lainnya yaitu masalah perjudian, narkoba, dan makin tingginya tindak kriminal seperti pencurian, penodongan, dan korupsi yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, pemerintah sedang mengupayakan penanganan masalah tersebut. Masalah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh jumlah pengangguran yang besar dan sempitnya lahan pekerjaan yang memicu masyarakat khususnya pengangguran untuk melakukan tindak kriminal.

Agar formulasi kebijakan bisa lebih mengarah kepada kepentingan publik, maka kebijakan harus disusun berdasarkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Formulasi kebijakan kurang mengikutsertakan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah tenaga kerja. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat tentu saja membutuhkan penanganan yang sangat serius dari

pemerintah diharapkan memiliki komitmen dan strategi khusus yang difokuskan untuk memecahkan masalah ketenaga kerjaan ini.

Secara umum kesempatan kerja akan lebih besar didapat oleh mereka yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi bila tingkat pendidikan seseorang tidak sama dengan kebutuhan di lapangan, maka setidaknya kondisi tersebut akan menjadi kendala bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, dan pada akhirnya akan timbul pengangguran di antara mereka yang sebenarnya mempunyai tingkat pendidikan cukup tinggi. Pengangguran jenjang SMK juga cukup tinggi di Lampung yaitu 13,79% (Sakernas, 2009). Jenjang pendidikan yang mereka tempuh umumnya sudah berorientasi pada keahlian (*skill*) tetapi daya *entrepreneur* mereka kurang tergali dengan baik, sehingga walaupun mereka memiliki keahlian kurang dapat diaplikasikan.

Demikian juga angka pengangguran untuk SMK khususnya di SMK SMTI Bandar Lampung semestinya harus rendah, tetapi yang terjadi hampir sama dengan sekolah SMA atau umum. Hal inilah yang perlu dikaji apakah peranan finansial atau anggaran yang tersedia dapat berpengaruh terhadap keterserapan mereka di dunia kerja setelah lulus. SMK SMTI Bandar Lampung memiliki anggaran yang cukup besar dan semakin tahun semakin meningkat. Hal ini seharusnya dapat berdampak pada tingkat kompetensi siswa yang berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka setelah lulus. Gambaran besarnya DIPA SMK SMTI Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 1. DIPA SMK SMTI Bandar Lampung

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran
1	2003	1,248,858,000
2	2004	1,530,354,000
3	2005	1,911,700,000
4	2006	2,801,009,000
5	2007	5,453,196,000
6	2008	4,515,006,000
7	2009	4,598,736,000
8	2010	4,607,997,000
9	2011	5,584,679,000
10	2012	7,509,563,000
	Rata-Rata	3,920,827,900

Sumber : Bendahara Keuangan SMK SMTI Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas bahwa besarnya dana dari tahun-tahun mengalami peningkatan yang signifikan tetapi persoalannya anggaran belum fokus pada dana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan tetapi lebih besar digunakan untuk alokasi gaji dan tunjangan. Hal tersebut dapat berdampak pada kualitas SDM industri yang dihasilkan baik dari aspek: pengetahuan dan ketrampilannya, sikapnya ataupun kerserapan lulusan setelah lulus. Pertambahan anggaran yang ada pada bidang layanan pendidikan ternyata belum meningkatkan kualitas siswa secara signifikan.

Persoalan yang terjadi persentase anggaran untuk mendukung pembelajaran masih kecil dibandingkan dana untuk gaji atau kegiatan lainnya. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi dimana sebagai suatu instansi yang melayani siswa dalam pengembangan pendidikan sebaiknya persentase yang cukup besar untuk bidang tersebut. Hal tersebut seharusnya berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan dimana siswa yang lulus memiliki mutu yang semakin meningkat atau 100%

dapat terserap didunia kerja dan industri. Gambaran jumlah keterserapan lulusan siswa adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Data Keterserapan Lulusan SMK SMTI Bandar Lampung

No	Tahun Anggaran	Jumlah Siswa	Jumlah terserap (%)
1	2003	109	36.70
2	2004	113	39.82
3	2005	115	72.17
4	2006	112	79.46
5	2007	105	69.52
6	2008	107	57.94
7	2009	113	61.06
8	2010	121	61.98
9	2011	119	75.63
10	2012	160	81.25

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terjadi kenaikan dan penurunan keterserapan lulusan dan kesenjangan antara kenaikan anggaran dengan penyerapan tenaga kerja sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Struktur alokasi anggaran belum fokus untuk layanan bidang pendidikan, tetapi lebih besar pada gaji dan operasional perkantoran.

2. Alokasi anggaran pada SMK SMTI belum tepat sehingga hal tersebut tidak begitu berdampak pada kompetensi lulusan yang dihasilkan.
3. Penggunaan anggaran belum efektif sehingga kualitas SDM industri SMK SMTI Bandar Lampung masih rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah efektivitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung yang dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah:

1. Apakah alokasi penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berpengaruh terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung.
2. Apakah alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung.
3. Apakah alokasi anggaran penguatan lembaga/sarana dan prasarana berpengaruh terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pengaruhnya terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung.

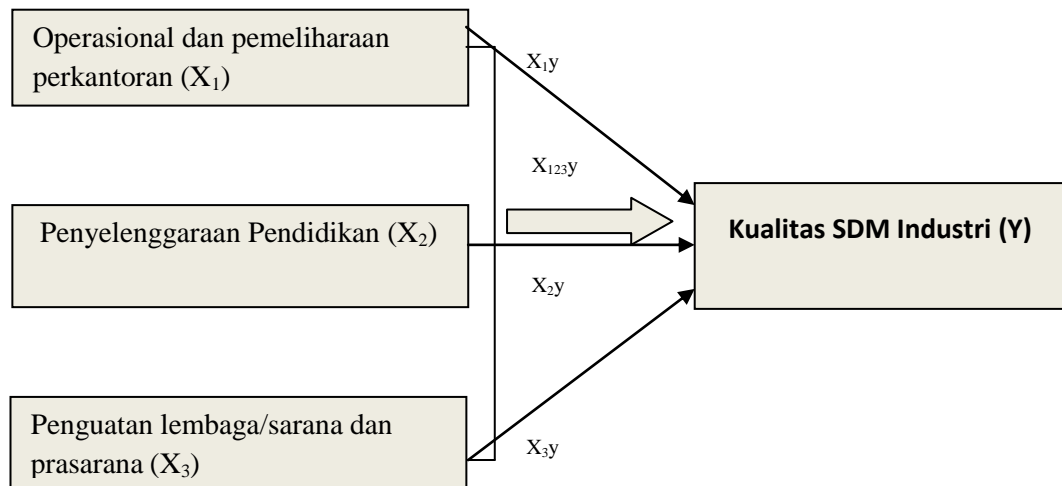
E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diduga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berpengaruh terhadap Kualitas SDM Industri Di SMK SMTI Bandar Lampung.

F. Kerangka Berpikir

Besarnya alokasi dana yang fokus pada bidang pendidikan meliputi aspek dana penyelenggaraan pendidikan kejuruan belum efektif, dibandingkan dana pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, penguatan lembaga/sarana dan prasarana atau laporan kegiatan. Dana penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih memiliki persentase cukup kecil, seharusnya persentase alokasi anggaran untuk hal tersebut semakin lama persentasenya semakin besar dibandingkan untuk alokasi dana lainnya. Hal tersebut akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM industri yang dihasilkan.

Secara umum dari masing-masing aspek atau variabel dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di SMK SMTI Tanjungkarang dapat di kelompokkan menjadi beberapa variabel yang digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir